

**ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 – 2022**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya*



**Oleh :**

**FRADEA ANDARSA**

**NIM. 20133033**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018-2022

Nama : Fradea Andarsa  
NIM : 20133033  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Padang, November 2023

Diketahui,  
Koordinator Prodi DIII  
Akuntansi

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 19840113 200912 2 005



Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc  
NIDN. 0010019103




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2018-2022

Nama : Fradea Andarsa  
NIM : 20133033  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	(Ketua)	1. 
Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	2. 
Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	(Anggota)	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fradea Andarsa  
Thn. Masuk/NIM : 2020/ 20133033  
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 07 Agustus 2002  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jorong Batang Linjuang, Nagari Tanjung Bungo  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2023

Yang menyatakan,



Fradea Andarsa

NIM. 20133030

## **ABSTRAK**

**Fradea Andarsa: Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

**Pembimbing : Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc**

Dalam suatu pemerintahan daerah diperlukan adanya laporan keuangan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah dalam satu periode yang digunakan sebagai informasi keuangan dan transaksi yang terjadi memudahkan dalam memahami laporan keuangan, maka diperlukan sebuah analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dari tahun 2018-2022 masih sangat rendah dan masih sangat bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat (eksternal). Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian.

**Kata kunci: Kinerja keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022”. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Selama pembuatan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Orang tua yang saya cintai, mama tersayang (Yuhendrawati), papa tersayang (Mus Ocha Andarsa), adik saya (Ferola Dwi Andarsa dan Frans Dhio Andarsa) dan Syamsuri Family yang telah memberikan dorongan, semangat, doa terbaik dan dukungan secara moril maupun materil.
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M. Sc selaku koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibuk Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

5. Bapak dan ibu dosen, serta Staf Pengajar dan Karyawan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
7. Pallee yang telah menemani dan memberikan motivasi dan dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
8. Sahabat terbaik dan tersayang saya Aliffia Amrina, Diva Afriyuda, Tiara Yosa Azhara, Aflah Fauziah dan Adisty Putri Eranto yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dan semoga sukses untuk kita,
9. Rekan-rekan seperjuangan khususnya DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dari Allah SWT. Penulis sudah berupaya dengan maksimal dalam menyusun tugas akhiri ini, namun apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan yang luput dari koreksi, penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2023

Fradea Andarsa

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	8
A. Keuangan Pemerintah.....	8
B. Akuntansi Keuangan Daerah .....	16
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	25
D. Analisis Rasio Keuangan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Bentuk penelitian.....	31
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	31
C. Rancangan penelitian.....	32
D. Teknik pengumpulan data.....	33
E. Teknik analisis data .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota .....	36
B. Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	36
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	37
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	4
2. penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	28
3. Kriteria Penilaian dalam Rasio Ketergantungan Daerah.....	29
4. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah .....	30
5. Kinerja Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal .....	34
6. Kriteria Penilaian dalam Rasio Keuangan Daerah.....	34
7. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah .....	35
8. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Dearah Kabupaten Lima Puluh Kota .	38
9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota .....	40
10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun...	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	48
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	50
3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	52
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	54
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang berkaitan dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Peraturan tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memajukan semua daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur analisis rasio keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan kinerja sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan tersebut. Serta menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang

berguna dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengaruh keuangan daerah dan perbaikan kinerja sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan tersebut. Serta menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah pelaksanaan otonomi daerah. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka analisis rasio yang dapat digunakan adalah analisis rasio keuangan pada APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi, apakah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya atau mengalami penurunan. Untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang ditargetkan dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian pada Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan dan bangunan. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh beberapa sektor tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Namun, Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah dan rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.

Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Lima

Puluh Kota pada tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 1. Data Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Padang Tahun 2018 - 2022

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten Lima Puluh Kota						
Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>PENDAPATAN</b>						
Pendapatan Asli Daerah	73.440.842.296	85.168.153.332	77.429.483.703	79.852.144.928	82.986.337.456	
Pendapatan Transfer	1.180.687.551.730	1.241.675.086.681	1.121.707.914.904	1.164.177.899.633	1.128.038.625.588	
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.040.019.636	9.642.270.290	10.333.998.383	16.762.501.744	14.514.513.770	
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.257.168.413.662</b>	<b>1.336.485.510.303</b>	<b>1.209.471.396.990</b>	<b>1.260.792.546.305</b>	<b>1.225.539.476.814</b>	
<b>BELANJA DAERAH</b>						
Belanja Operasi	870.327.418.512	950.349.059.201	874.999.821.692	956.701.509.114	921.225.899.318	
Belanja Modal	232.636.603.714	252.910.521.752	152.712.089.645	147.622.625.105	149.956.373.682	
Belanja Tak Terduga	147.861.750	659.859.470	36.111.744.605	766.542.837	708.965.000	
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.103.111.883.976</b>	<b>1.203.919.440.423</b>	<b>1.063.823.655.942</b>	<b>1.105.100.877.056</b>	<b>1.071.891.237.980</b>	
TRANSFER	142.700.297.570	158.196.910.009	153.293.933.843	161.270.961.166	158.703.493.317	
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	11.356.232.116	- 25.630.840.128	- 7.646.192.794	- 5.579.091.916	- 5.055.254.483	
<b>PEMBIYAAAN</b>						
Penerimaan Pembiayaan	75.512.500.110	80.874.732.226	38.843.992.097	28.847.799.302	21.768.707.385	
Pengeluaran Pembiayaan	2.994.000.000	15.359.000.000	2.350.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
Pembiayaan Neto	69.518.500.110	65.515.732.226	36.493.992.097	27.347.799.302	20.268.707.385	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	80.874.732.226	39.884.892.097	28.847.799.302	21.768.707.385	15.213.452.902	

Sumber: BPK Perwakilan Sumatera Barat (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, Pendapatan Asli Daerah masih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Itu artinya Kabupaten Lima Puluh Kota masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan daerah guna untuk mengevaluasi apakah telah menggunakan APBD secara ekonomis. Karena untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat dikur melalui kinerja keuangan daerah.

Dalam laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah, kita hanya dapat melihat kondisi keuangannya dalam jumlah rupiahnya saja, namun belum dapat menunjukkan bagaimana kinerja keuangannya, sehingga penting dilakukan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai apakah mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Untuk menganalisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Analisis derajat desentralisasi, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis kemandirian keuangan daerah. Laporan keuangan yang dipublikasi menyajikan informasi keuangan yang bersifat umum sesuai tujuan penyajian laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan yang informasinya dapat digunakan pemerintah untuk melihat kemampuan dan keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk memahami arti dari informasi keuangan tersebut perlu keahlian menafsirkan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan melalui analisa laporan keuangan. Dengan melakukan analisa atas laporan keuangan maka diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2018-2022 menggunakan analisis laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Rasio Derajat Desentralisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Rasio Ketergantungan Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis mengambil judul ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Rasio Derajat Desentralisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Rasio Ketergantungan Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawancara penulis tentang analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan

3. Bagi Pembaca

Diharapkan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kinerja keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Keuangan Pemerintah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Kuswandi (2016) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Mamesah (Halim,2002:19) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2008:25) keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk kedalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang, baik itu berupa barang atau kekayaan yang